

Kajari Pastikan Anggaran Mamin Unsur Pimpinan DPRD Jeneponto Tetap Diproses

Syamsir, HR - JENEPONTO.JUSTISIA.CO.ID

Feb 20, 2023 - 16:07



Foto Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan, Susanto Gani.

JENEPONTO, SULSEL,- Kejaksaan Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan, tidak tinggal diam setiap ada laporan yang ditanganinya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Susanto Gani menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk, pihaknya otomatis menindaklanjuti.

"Ia setiap ada laporan yang masuk ke kami pasti kami proses," tegas Kajari Jeneponto, Susanto kepada Wartawan saat ditemui di kantornya, Senin (20/02/2023).

Seperti, ungkap Susanto, Laporan Makan minum (Mamin) unsur Pimpinan DPRD

Jeneponto yang sejauh ini perkembangannya masih dalam proses klarifikasi.

"Ia memang ada laporannya masuk ke kami terkait makan minum unsur Pimpinan DPRD Jeneponto. Namun sejauh ini kita masih proses klarifikasi," ucapnya.

Susanto menyebut bahwa sudah memanggil beberapa pihak dari DPRD Jeneponto untuk dimintai klarifikasinya.

Disamping itu, Susanto juga sementara pengumpulan data atau bahan informasi. Baik informasi dari teman-teman wartawan yang memberitakan maupun informasi di Media sosial (Medsos).

Sayangnya, Kajari Jeneponto Susanto Gani belum bisa menyebut siapa-siapa saja yang terlibat indikasi penyimpangan uang Makan minum (Mamin) unsur Pimpinan DPRD Jeneponto.

"Ini kan masih proses klarifikasi. Saya belum bisa menjelaskan terlalu dalam siapa-siapa yang dimaksud," katanya.

Begitupun kata dia, nominal anggaran uang makan minum yang menyertakan unsur Pimpinan DPRD Jeneponto tersebut.

"Ia tidak ada nilai nominal atau uang makan dan minum DPRD Jeneponto yang disebutkan," urainya.

Meski demikian, Susanto Gani berjanji bahwa terkait laporan mamin DPRD Jeneponto akan menyampaikannya lebih lanjut keteman-teman.

"Kami pastikan laporannya tetap berjalan dan terkait prosesnya kami akan sampaikan secara terbuka dan transparan," jelas Susanto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Lembaga Pengawasan Pengguna Anggaran Republik Indonesia (LPPA-RI), Syamsuddin Nampo membeberkan anggaran Makan minum (Mamin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan diduga dikorupsi.

Syamsuddin Nampo menyebut, anggaran mamin itu menyeret tiga pucuk pimpinan DPRD Jeneponto, masing-masing diketahui, Ketua DPRD Jeneponto, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

"Jadi itu anggaran mamin diambil sama ketiga orang ini, Ketua DPRD Jeneponto Arifuddin, Wakil Ketua I Irmawati dan Wakil Ketua II, Imam Taufik, itu sampai sekarang," sebut Nampo sesaat lalu.

Semenjak, beralih Pimpinan DPRD Jeneponto dari Hj. Salmawati ke H Arifuddin anggaran mamin sebesar kurang lebih Rp. 5 miliar tersebut terus cair hingga 2023 ini, tutup Syamsuddin Nampo.

Dikutip Rakyatsulsel.co.id. Dari tiga tahun penganggaran (2020, 2021 dan 2022), jumlah total anggaran makan minum pimpinan DPRD Jeneponto yang telah keluar atau tercairkan diperkirakan mencapai sebesar kurang lebih Rp. 5.220.000.000 atau lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah, hal tersebut

berdasarkan anggaran makan minum ketua DPRD sebesar Rp75 Juta perbulan, untuk posisi wakil ketua masing- masing Rp35 Juta perbulan.

Sementara itu, salah satu unsur Pimpinan DPRD Jeneponto, Wakil Ketua I, Irmawati mengatakan, terkait anggaran makan minum pimpinan DPRD Jeneponto yang kurang lebih Rp5 miliar itu, darimana dia berhitung sehingga ada dana tersebut.

"Darimana hitung-hitungannya, darimana. Itu fitnah, itu tidak ada N'di. Dan saya kira itu fitnah," katanya.

Menurut Irmawati, selama pergantian pucuk pimpinan Ketua DPRD Jeneponto tidak ada anggaran yang cair terkait makan minum pimpinan DPRD Jeneponto.

"Adapun itu cuma perbaikan teras dan tegel rumah jabatan dan itupun pakai uang pribadi saya. Saya membeli lemari, tempat tidur dan perabot lainnya pakai dana pribadi," bebarnya.

Penulis: Syamsir.